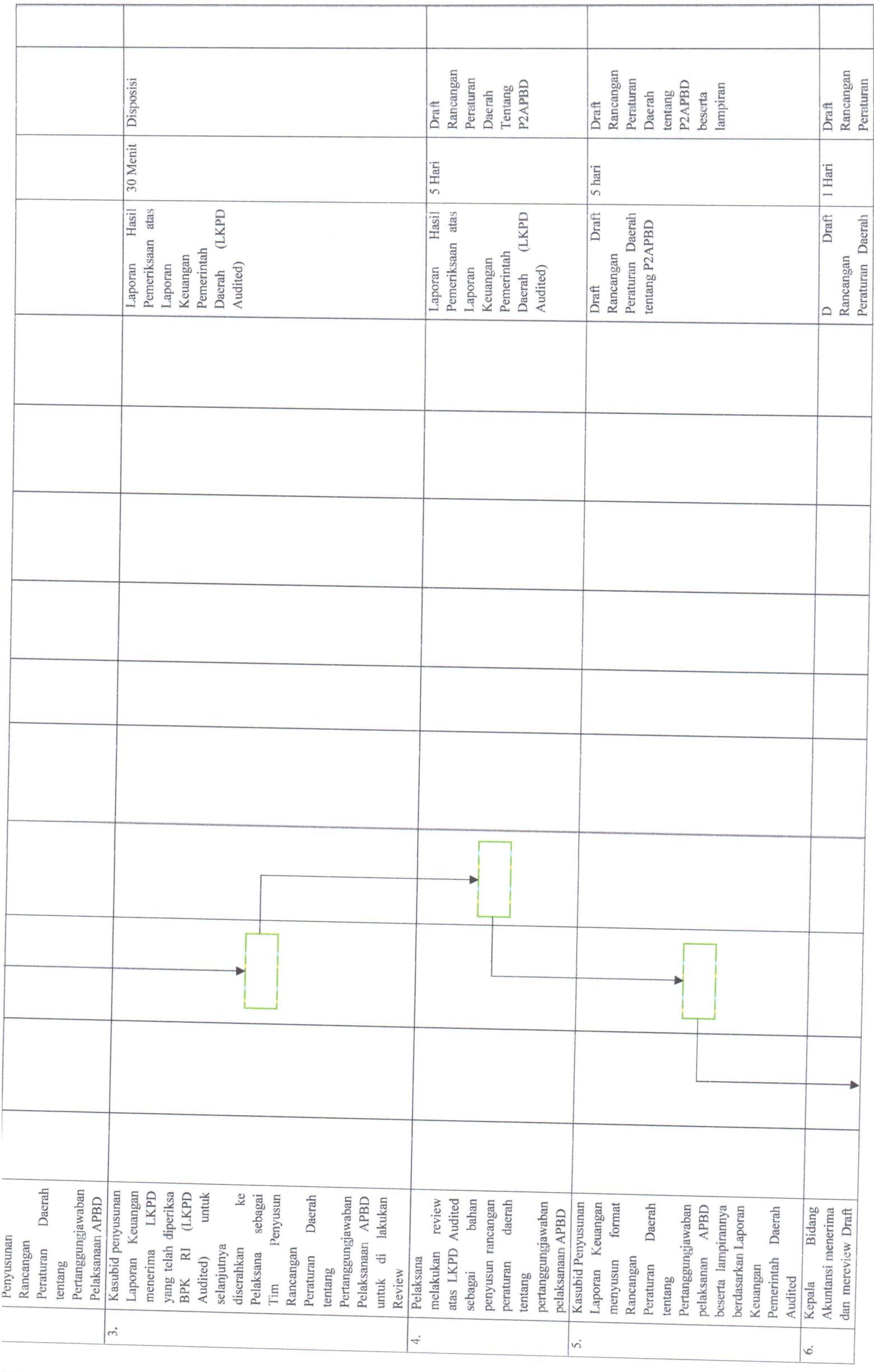


Nomor SOP	000.5/0/1/SOP-BKAD.3/2025
Tanggal Pembuatan	19 Januari 2025
Tanggal Revisi	28 Februari 2025
Tanggal Efektif	19 Januari 2025
Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN	 <p>Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p> <p>IDI KURNIADI, S.I.P., MM NIP. 19710908 199901 1 001</p>
Disahkan Oleh	<p><b>DASAR HUKUM</b></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara      2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara      3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Pemerintah Daerah;      4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;      5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah      6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan      7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah      8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 1 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah      9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah      10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 46.a Tahun 2014 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah      11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi</p>
<b>Nama SOP</b>	<b>Penyusunan Raperda P2APBD</b>
	<p><b>Kualifikasi Pelaksanaan</b></p> <p>1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;      2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa keuangan;      3. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa data kinerja.</p>
	<p><b>Keterkaitan</b></p> <p>1. SOP – Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan      2. SOP – Pencarian Data dan Informasi</p> <p><b>Peringatan</b></p> <p>Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LKPD ini tidak akan berjalan lancar sesuai jadwal dan mendapatkan teguran dari Pemerintah</p>
	<p><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <p>1. Aplikasi      2. Alat Tulis Kantor      3. Komputer Perangkat Lainnya</p> <p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <p>Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited, Lampiran-lampiran Laporan Keuangan.</p>

**Penyusunan Raperda P2APBD**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						KET					
		KEPALA BKAD	KABID AKUNTANSI	KASUBID PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	SEKRETARIS DAERAH	PELAKSANA	BUPATI	DPRD	GUBERNUR	MENDAGRI	KENTERI KEUANGAN	MUTU WAKTU	OUTPUT
1.	Berdasarkan Laporan Keuangan Perintah Dacrah yang telah diperiksa BPK-RI (LKPD Audited) yang telah diterima dari BPK-RI. Kepala BKAD selaku kepala Kepala SKPKD atau selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) memerintahkan kepada Kepala Bidang Akuntansi untuk segera menyusun RAPERDA tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pangandaran. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperlukan BPK-RI beserta lampirannya sesuai										Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD Audited)	30 Menit	Disposisi
2.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di periksa BPK RI (LKPD AUDITED) dan selanjutnya diserahkan ke kasubid untuk dilakukan										Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD Audited)	30 Menit	Disposisi



Kancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Daerah menerima Rancangan Peraturan Tentang Daerah pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disampaikan kepada Daerah Sekretaris Daerah	P2APBD tentang Daerah menerima Rancangan Peraturan tentang Daerah pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disampaikan kepada Daerah Sekretaris Daerah	P2APBD tentang Daerah menerima Rancangan Peraturan tentang Daerah pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk diserahkan Kepada Daerah	P2APBD tentang Daerah menerima Rancangan Peraturan tentang Daerah pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas bersama	P2APBD tentang Daerah menerima Rancangan Peraturan tentang Daerah pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, membuat jadwal, melakukan direview	Daerah tentang P2APBD beserta lampiran yang telah direview
7.	Kepala BKAD				Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang P2APBD beserta lampirannya yang telah di review	1 Hari
					Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang P2APBD beserta lampirannya yang telah di review	1 Hari
					Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang P2APBD beserta lampirannya	1 Hari
					Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang P2APBD beserta lampirannya	1 hari
					Rancangan Peraturan Daerah tentang P2APBD beserta lampirannya	30 Hari
					Tidak	
						Ya

pemparasan,	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Daerah menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dengan DPRD dan diserahkan kepada Kepala BKAS untuk ditindaklanjuti					persetujuan bersama
11.	Kepala Daerah menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dengan DPRD dan diserahkan kepada Kepala BKAS untuk ditindaklanjuti		Rancangan Peraturan Daerah tentang P2APBD yang telah disetujui	60 Menit	Disposisi		
12.	Kepala BKAD menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dengan DPRD dan diserahkan kepada Kepala Bidang Akuntansi		Rancangan Peraturan Daerah tentang P2APBD yang telah disetujui	15 Menit	Disposisi		
13.	Kepala Bidang Akuntansi menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetuju bersama dengan DPRD selanjutnya diserahkan kepada Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan sebagai bahan		Rancangan Peraturan Daerah tentang P2APBD yang telah disetujui	15 Menit	Disposisi		

evaluasi oleh	Gubernur	Kasubid Keuangan	Penyusun Keuangan	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Bidang Akuntansi dan menyerahtakan ke Tim penyusun untuk mempersiapkan bahan evaluasi yang akan disampaikan Gubernur	Rancangan Peraturan Daerah tentang P2APBD yang disetujui	15 Menit	Disposisi
14	Laporan Keuangan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Bidang Akuntansi dan menyerahtakan ke Tim penyusun untuk mempersiapkan bahan evaluasi yang akan disampaikan Gubernur						
15	Tim Penyusun menyiapkan dan melengkapi bahan untuk evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Gubernur				Rancangan Peraturan Daerah tentang P2APBD yang disetujui	1 Hari	Bahan evaluasi Gubernur
16	Kasubid penyusun laporan Keuangan menerima dan melakukan review atas bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang akan disampaikan Gubernur				Bahan Gubernur	30 Menit	Dokumen evaluasi Gubernur
17	Kepala bidang Akuntansi dan Pelaporan menerima dan melakukan review atas bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah				Dokumen evaluasi Gubernur	30 Menit	Dokumen evaluasi Gubernur yang telah direview

18	Kepala BKAD	BKAD	bahan evaluasi Gubernur Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang diserahkan ke Kepala BKAD	Dokumen evaluasi Gubernur yang telah direview	30 Menit	Dokumen Evaluasi Gubernur, Surat Pengantar ke Bupati
19	Sekretaris Daerah	Daerah	menerima evaluasi atas Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang diserahkan Kepala melalui Sekretaris Daerah	Dokumen evaluasi Gubernur, Surat Penyampaian ke Bupati	60 menit	Dokumen evaluasi Gubernur, Surat Penyampaian ke Bupati
20	Kepala Daerah	Daerah	menerima evaluasi atas Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk diserahkan kepada Kepala Daerah	Dokumen evaluasi Gubernur	1 Hari	Dokumen Evaluasi Gubernur, Surat Penyampaian ke Gubernur
21	Pelaksanaan evaluasi Peraturan tentang Pertanggungjawaban	Rancangan Daerah	Tidak Ya	Dokumen evaluasi Gubernur	15 Hari	Surat Keputusan Gubernur

	Pelaksanaan APBD oleh Gubernur						
22	Penyampaian Keputusan Gubernur tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Bupati				Surat Keputusan Gubernur	1 Hari	Disposisi
23	Kepala BKAD menerima keputusan Gubernur tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				Surat Keputusan Gubernur	15 Menit	Disposisi
24	Kepala Bidang Akuntansi menerima Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala BKAD yang selanjutnya di disposisikan ke Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan Daerah				Surat Keputusan Gubernur	15 Menit	Disposisi
25	Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan menerima disposisi dari Kepala Bidang Akuntansi untuk menyusun tanggapan atas keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang				Surat Keputusan Gubernur	15 Menit	Disposisi

```

graph TD
    A[Step 22] --> B[Step 23]
    B --> C[Step 24]
    C --> D[Step 25]
  
```

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD									
No	Pelaksanaan	Dokumen	Kegiatan	Tujuan	Waktu	Bahan	Penanggungjawab	Penanggungjawaban	Hasil
26	Pelaksanaan draft tanggapan Bupati atas keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi APBD,						Surat Keputusan Gubernur	1 Hari	Draft tanggapan Bupati atas Hasil Evaluasi Gubernur
27	Kasubid penyusunan Laporan draft tanggapan bupati, atas keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						Draft tanggapan Bupati atas Hasil Evaluasi Gubernur	15 Menit	Draft tanggapan Bupati atas Hasil Evaluasi Gubernur
28	Kepala Bidang Akuntansi mereview draft tanggapan Bupati atas Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan menyerahkannya kepada BKAD						Draft tanggapan Bupati atas Hasil Evaluasi Gubernur yang telah direview	15 Menit	Draft tanggapan Bupati atas Hasil Evaluasi Gubernur yang telah direview
29	Kepala BKAD menyampaikan draft tanggapan Bupati atas Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disusun kepada Bupati melalui Sekretaris Dearah						Draft tanggapan Bupati atas Hasil evaluasi Gubernur yang telah direview	15 Menit	Draft tanggapan Bupati atas Hasil evaluasi Gubernur yang telah direview

30	Sekretaris menerima tanggapan atas Gubernur tentang evaluasi Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Daerah draft Bupati Keputusan atas Gubernur, tentang evaluasi Rancangan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bupati Keputusan atas Bupati Keputusan atas Gubernur tentang evaluasi Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Draft tanggapan Bupati atas Hasil evaluasi Gubernur, Surat Pengantar Bupati	60 Menit	Draft tanggapan Bupati atas Hasil
31	Bupati menerima dan mendatangi Bupati atas Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas bersama	Keputusan atas Bupati Keputusan atas Gubernur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas bersama	Tanggapan Bupati atas Hasil evaluasi Gubernur	1 Hari	Tanggapan Bupati atas Hasil	Tanggapan Bupati atas Hasil evaluasi Gubernur
32	DPRD membahas tanggapan Bupati atas Keputusan Gubernur tentang Hasil evaluasi Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terkait penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Keputusan atas Bupati Keputusan atas Gubernur tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terkait penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tanggapan Bupati atas Hasil evaluasi Gubernur	1 Hari	Keputusan DPRD	Keputusan DPRD
33	Bupati bersama DPRD menetapkan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Keputusan DPRD, Rancangan Peraturan Daerah tentang P2APBD	Keputusan DPRD, Rancangan Peraturan Daerah tentang P2APBD	1 Hari	Perda P2APBD	Perda P2APBD

							Perda P2APBD	Disposisi
1	menerima P2APBD yang telah diterapkan Bupati memerintahkan kepada Akuntansi	Bidang Akuntansi					15 Menit	
2	Kepala Akuntansi menerima disposisi dari Kepala BKAD dan meneruskannya ke Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan	Bidang Akuntansi				Perda P2APBD	Disposisi	15 Menit
3	Kasubid Penyusunan Laporan keuangan menerima disposisi dan meneruskannya ke Pelaksana					Perda P2APBD	Disposisi	15 Menit
4	Pelaksana Membuat surat pengantar penyampaian Perda P2APBD ke Bupati untuk disampaikan ke Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan					Perda P2APBD	Disposisi	15 Menit
5	Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan melakukan review, apabila telah sesuai surat pengantar penyampaian akan di paraf dan disampaikan ke Kepala Bidang Akuntansi					Perda P2APBD	60 Menit	Draft surat pengantar Penyampaian Perda P2APBD
6	Kepala Bidang melakukan review, apabila telah sesuai surat pengantar penyampaian akan diparaf dan disampaikan ke Kepala BKAD					Draft surat pengantar Penyampaian Perda P2APBD, Perda P2APBD	15 Menit	Perda P2APBD, Surat Pengantar Perda P2APBD

